

Praktik Budaya Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Bontobiraeng Selatan

Ratnah Rahman, Guruh Ryan Aulia, Nur Rahma

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: ratnah.rahman@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini berusaha menjelaskan tentang praktik budaya politik dalam pemilihan kepala daerah di Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat di Bontobiraeng Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan konsep budaya politik yang ditawarkan Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik budaya politik dalam pemilihan kepala daerah di Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa yaitu praktik budaya politik partisipan, budaya politik kaula dan budaya politik mobilisasi. Faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat di Bontobiraeng Selatan yaitu tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, politik uang dan kekerabatan.

Kata Kunci :

Budaya Politik, Pilkada, Partisipan, Kaula, Mobilisasi

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu ajang pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakil rakyat yang akan menduduki jabatan tertentu dalam masyarakat baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

Cara manusia menjalani kehidupannya dalam suatu masyarakat umumnya berbeda-beda tetapi manusia memiliki perang yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara. Orang-orang yang berada dalam

posisi berkuasa berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, yang mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Di luar itu mereka juga membutuhkan pengakuan, eksistensi diri, dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian pemberian kerja, upah, status sebagai anggota masyarakat maupun status sebagai anggota partai politik tertentu.

Di dunia politik, faktor budaya dapat memainkan peran penting dari waktu ke waktu. Misalnya arah kebijakan politik suatu bangsa dapat ditentukan oleh sistem struktural pada masanya, yang didasarkan

pada hukum dan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Namun pada akhirnya, cara masyarakat memandang isu dan peristiwa politik ditentukan oleh budaya politik mereka. Politik mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat seperti keagamaan, kegiatan ekonomi, bisnis, hubungan internasional, serta hubungan sosial di masyarakat (Pureklolon, 2021). Konsep ini juga mengacu pada bagaimana kehidupan publik seperti upacara keagamaan, pidato publik mempengaruhi kebijakan politik. Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa budaya politik adalah cara masyarakat Indonesia memandang cita-cita mereka dan bagaimana cita-cita tersebut membentuk kehidupan politik mereka.

Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, setiap warga negara perlu terlibat aktif dalam sistem pemerintahan. Mereka tidak bisa begitu saja menerima dan memenuhi tuntutan orang lain, mereka perlu berpartisipasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersifat demokratis.

Dalam setiap masyarakat terdapat budaya politik yang mencerminkan pandangan politik masyarakat terhadap proses politik yang berlangsung dalam masyarakat tersebut. Tingkat kesadaran dan partisipasi biasanya menjadi hal yang paling penting untuk mengukur dan menilai perkembangan politik suatu masyarakat.

Budaya politik masyarakat pedesaan atau pedalaman biasanya ditentukan oleh pilihan politik pemimpinnya, baik pemimpin

adat maupun masyarakat desa secara keseluruhan, hal ini dikarenakan masyarakat desa masih sangat tradisional (Riyanti, 2017). Masyarakat desa adalah orang yang tinggal di lingkungan pedesaan. Mereka biasanya bekerja sama sebagai petani, buruh, PNS, pedagang dan kehidupan sosial mereka didasarkan pada rasa kekeluargaan yang kuat. Meskipun kehidupan sosial mereka didasarkan pada kekerabatan, mereka berinteraksi satu sama lain secara teratur.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun 2020. Pilkada di Kabupaten Gowa diikuti oleh calon tunggal dengan lawan kotak kosong. Pilkada di Kabupaten Gowa juga diselenggarakan di waktu dan kondisi yang masih memprihatinkan yaitu diselenggarakan di situasi pandemik Covid-19.

Budaya politik masyarakat Desa Bontobiraeng terlihat pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Gowa. Selain posisi politik dan partai, banyak faktor lain yang mempengaruhi budaya politik dalam suatu Pemilu, seperti faktor ekonomi, sikap politik, tingkat pendidikan, dan situasi pandemik Covid-19. Berbagai permasalahan tersebutlah yang menjadi budaya baru terhadap pemilihan umum yang diselenggarakan di masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Imanuel N. Tadanugi menulis tentang *Budaya Politik Lokal Pada Pilkades Di Kecamatan Lage Kabupaten Poso Tahun 2010*. Imanuel menjelaskan bahwa suksesi kepemimpinan lokal di Kecamatan Lage secara umum positif dan relatif demokratis. Hal ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor agama, afiliasi politik, etnis dan jenis kelamin. Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Hanya saja *money politics* masih saja terjadi (Tadanugi, 2015).

Dwi Listia Rika Tini menulis tentang *Relasi Budaya Politik Di Madura Terhadap Demokrasi Lokal: Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya politik dengan demokrasi dan kepemimpinan lokal di Madura secara umum positif dan relatif demokratis. Terjadinya *good governance* dengan melibatkan masyarakat dalam kepentingan publik dan tidak terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor afiliasi politik ataupun etnis. Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Namun dalam Pilkades di Sumenep masih ada hal-hal yang dapat mencederai demokrasi misalnya politik uang (Tini, 2017).

Kedua artikel di atas berbeda dengan penelitian kami, yang absen dari keduanya adalah ketiadaan faktor pendidikan dan

ekonomi sebagai penentu dalam pemilihan.

TINJAUAN TEORETIS

Budaya Politik

Awalnya konsep budaya politik lahir dan memberikan warna baru ke dalam ilmu politik saat perang dunia (PD II) meletus. Sebagai dampak dari perkembangan politik di Amerika Serikat. Setelah PD II selesai, di Amerika Serikat terjadi revolusi dalam ilmu politik yang dikenal dengan sebutan *Behavioral Revolution* atau *Behavioralism*. Hal ini merupakan dampak dari menguatnya tradisi atau paham positivisme, di mana paham ini percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam. Paham ini diyakini kuat oleh tokoh-tokoh besar sosiologi seperti Herbert Spencer, Auguste Comte, dan Emile Durkheim (Gaffar, 2006).

Budaya politik adalah pola perilaku dan orientasi individu dalam kehidupan, penyelenggaraan administrasi negara, kebijakan pemerintah, hukum, adat istiadat, dan konvensi di mana semua anggota masyarakat hidup sehari-hari. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai sistem nilai bersama masyarakat dengan kesadaran bahwa ia ikut serta dalam pengambilan keputusan kolektif dan menentukan kebijakan publik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pendekatan perilaku politik dijumpai tentang tata cara orang berinteraksi antar satu sama lain berdasarkan penge-

tahuan, sikap, dan nilai-nilai mereka. Ini kemudian menentukan orientasi politik mereka, yang pada gilirannya membentuk dan mempengaruhi cara budaya politik seseorang.

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba menjelaskan bahwa budaya politik adalah sikap seseorang terhadap sistem politik dan perangkatnya, juga sikap seseorang terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain adalah orientasi psikologis terhadap objek sosial. Sistem politik mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif, afektif, dan evaluative (Sitepu, 2012). Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi orientasi individu dalam memandang objek-objek politik. Almond dan Verba mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yakni: *Pertama*, orientasi kognitif mengacu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan terhadap sistem politik dan berbagai aspeknya. Misalnya keyakinan individu tentang pemerintah, kebijakan yang diambil, dan mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya.

Kedua, orientasi afektif menyangkut perasaan mereka tentang sistem politik yang kemudian mempengaruhi kesediaan mereka untuk menerima atau menolak sistem politik. *Ketiga*, orientasi evaluatif berkaitan dengan cara berpikir dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek politik yang secara khas melibatkan perpaduan standar nilai

dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Perkembangan budaya politik suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan warganya, tingkat kesejahteraan ekonomi, luasnya reformasi politik, penegakan supremasi hukum, dan kebebasan media. Faktor pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses ini. Semakin berpendidikan suatu masyarakat, semakin besar kemungkinan budaya politiknya akan berkembang secara progresif.

Gabriel A. Almond menjelaskan bahwa sistem politik muncul sebagai orientasi dan pola perilaku politik tertentu. Dalam pengertian yang kurang lebih sama, Lucian W. Pye mendefinisikan budaya politik sebagai tatanan realisme subyektif politik (politik tatanan dunia subyektif). Definisi Sidney Verba selanjutnya adalah yang paling jelas dan menyatakan bahwa budaya politik mengacu pada pola interaksi politik dan sistem kepercayaan tentang institusi politik (Hasmirah, 2007).

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dari sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah jumlah pandangan politik, termasuk norma, pola arah politik, dan pandangan hidup secara umum. Budaya politik mengutamakan aspek psikologis sistem politik, atau sikap. Sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki oleh individu dan berfungsi di semua masyarakat sesuai dengan harapan (Budiardjo, 2007).

Praktik budaya politik yang berkembang di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang diinginkan, tetapi juga membutuhkan adanya aspirasi dan pandangan politik terhadap situasi politik saat ini. Praktik budaya politik yang berkembang di masyarakat tentunya dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti sejarah perkembangan sistem, agama yang dianut masyarakat, etnis, kelas sosial, dan sistem kepemimpinan.

Masyarakat Desa

Masyarakat desa adalah sebuah gambaran kehidupan masyarakat yang masih erat dengan sistem kehidupan berkelompok dengan dasar hubungan kekeluargaan yang erat. Pada dasarnya masyarakat hidup dari hasil pertanian dan bersifat *homogeny* dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat desa identik dengan istilah gotong royong yang merupakan prinsip kerjasama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama. Secara umum desa diartikan kondisi geografis suatu daerah atau wilayah yang penduduknya berprofesi sebagai petani. Koentjaraningrat dalam Rahardjo mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu wilayah. Defenisi ini tidak menegaskan bahwa pedesaan itu identik dengan pertanian (Rahardjo, 2010).

Masyarakat desa memiliki ciri-ciri dalam kehidupan sosial yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penduduk desa dapat dicirikan dengan memiliki ikatan perasaan batin yang kuat satu sama

lain. Artinya seseorang merasa menjadi bagian dari masyarakat dimanapun dia tinggal dan memiliki perasaan rela berkorban apapun demi anggotanya.

Ferdinand Tonnies membagi masyarakat ke dalam dua kelompok yaitu paguyuban (*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*) (Soekanto, 2006). Paguyuban adalah kelompok yang sangat dekat dan intim. Kedekatan ini bisa datang dari lahir, dari menikah dengan seseorang dalam kelompok, atau menjadi bagian dari keluarga yang memiliki ikatan yang sama. Ada tiga jenis kelompok sosial: yang didasarkan pada ikatan darah, yang didasarkan pada kedekatan tempat, dan yang didasarkan pada minat dan keyakinan yang sama. Patembayan sendiri merupakan ikatan yang berlangsung untuk jangka waktu tertentu, dan didasarkan pada kepercayaan. Terkadang, ikatan pernikahan bisa didasarkan pada cinta. Ikatan timbal balik, seperti antara pedagang dan pelanggannya, seringkali didasarkan pada ikatan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, mengumpulkan data secara deskriptif dan menggunakan pendekatan analisis induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian situasional yang menggunakan manusia sebagai alat dan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian deskriptif didefinisikan dengan baik, sistematis, berdasarkan fakta, dan

menggunakan variabel yang diamati langsung secara tepat dan spesifik untuk menjelaskan fenomena sosial. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada otentisitas, bukan dari teori tetapi dari fakta yang ada, yaitu dengan menekankan fakta bahwa komunitas benar-benar muncul di tempat atau wilayah tertentu (Sugiyono, 2006).

PEMBAHASAN

Praktik Budaya Politik dalam Pilkada di Desa Bontobiraeng Selatan

Desa Bontobiraeng Selatan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Desa Bontobiraeng Selatan berdasarkan struktur pemerintahannya merupakan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa Bontobiraeng Selatan terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Anassappu, Dusun Kale Anassappu dan Dusun Kacci-Kacci. Secara geografis letak wilayah Desa Bontobiraeng Selatan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontobiraeng Utara, sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Tamallayang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Romanglasa, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kale Barembeng.

Desa Bontobiraeng Selatan dapat dikatakan sebagai desa yang maju di Kecamatan Bontonompo, hal itu karena banyaknya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh para pemudanya, semua ini karena ditunjang oleh beberapa organisasi. Adapun organisasi yang ada di Desa Bontobiraeng Selatan yaitu Karang Taruna, IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), Lapak

Baca Aksara Semesta, Sanggar Seni Benteng Sappu, dan Peduli Gowa. Selain itu pemikiran masyarakatnya juga sudah semakin maju terbukti pada Pemilukada Tahun 2020 hampir semua masyarakat mengetahui informasi mengenai Pilkada baik itu dari media televisi, media massa, internet maupun dari baliho yang terpasang di pinggir jalan.

Hampir semua masyarakat Bontobiraeng mengenal calon bupati dan wakil bupati mereka, itu tidak terlepas karena kandidat calon Bupati Gowa adalah petahana yang kemudian mencalonkan kembali menjadi Bupati melawan kotak kosong. Tetapi hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui visi dan misi Bupati mereka. Hal itu tentu disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan masyarakat, faktor kesibukan, sifat acuh tak acuh, dan sikap masa bodoh terhadap sistem politik yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan di lapangan disimpulkan bahwa praktik budaya politik masyarakat di Desa Bontobiraeng Selatan, yaitu budaya partisipan, kaula dan mobilisasi.

Praktik Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan mengacu pada jenis budaya politik di mana warga masyarakatnya sangat aktif dalam politik. Budaya politik ini dicirikan oleh sikap, perilaku, dan pandangan orang-orang yang terlibat dalam proses politik. Yang berorientasi pada pembentukan budaya politik partisipan, di mana memberikan

kesempatan kepada warga masyarakat untuk memilih pemimpin, membantu memimpin pemerintahan, dan mencopot pemimpin jika diketahui melanggar kontrak sosialnya.

Masyarakat Bontobiraeng memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah melalui keterlibatan atau partisipasi mereka dalam pemilu dan dalam bentuk aktivitas politik lainnya. Namun yang lebih penting adalah cara mereka menanggapi kebijakan pemerintah begitu mereka berkuasa. Warga negara yang sangat terlibat dalam politik cenderung menganggap diri mereka sebagai bagian dari pemerintah, bukan di luarnya. Sebagaimana dikemukakan oleh RT bahwa:

“Setiap ada pemilihan umum salah satunya yaitu Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini pemilihan Bupati, tentu masyarakat di sini sangat antusias dalam memberikan aspirasinya untuk menyalurkan hak dan kewajibannya dalam pemilihan umum.” (RT, 2021).

Hal Senada juga diungkapkan oleh SU bahwa:

“Saya setiap tahun mengikuti Pemilihan Umum yang diselenggarakan, seperti Pemilihan Pak Bupati baru-baru ini, saya sadar bahwa kita sebagai warga Negara Indonesia harus menggunakan hak suara kita dengan selayaknya untuk Negara Indonesia yang lebih maju”.

Masyarakat Desa Bontobiraeng Selatan tentunya menerapkan budaya politik partisipan. Salah satu kegiatan atau praktik budaya politik partisipannya bisa kita lihat

pada Pilkada di Kabupaten Gowa tahun 2020. Keterlibatan masyarakat tidak terlepas dari beberapa alasan dalam menggunakan hak pilihnya. Semua terjadi karena kesadaran mereka atas kewajibannya sebagai warga masyarakat. Keikutsertaan mereka dalam Pilkada serentak tahun 2020 secara tidak langsung turut mengubah daerah mereka menjadi lebih baik. Mereka menyadari bahwa sebagai warga masyarakat harus menyalurkan aspirasinya dengan menggunakan hak pilihnya dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bontobiraeng Selatan itu adalah mereka yang mempunyai budaya politik dengan sifat partisipan dari segi *outputnya*. Pasalnya, masyarakat Desa Bontobiraeng Selatan memiliki motivasi dan keinginan untuk terlibat dalam perubahan negara dan daerah menjadi lebih baik. Hal ini tentunya akan ditunjukkan oleh masyarakat dengan mengikuti dan berpartisipasi dalam memberikan hak pilih pada Pilkada Kabupaten tahun 2020.

Budaya Politik Kaula

Budaya politik kaula memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam budaya politik partisipan. Budaya politik kaula sedikit kurang aktif dibandingkan budaya partisipan, dan mereka memiliki pemahaman yang sama tentang sistem politik sebagai warga negara. Mereka peduli dengan sistem politik, tetapi tidak terlalu bersemangat untuk ikut berpartisipasi bahkan mereka merasa tidak nyaman mem-

bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan politik.

Konteks budaya politik kaula, kesadaran masyarakat akan adanya kewenangan pemerintah atau kekuasaan dalam masyarakat cukup tinggi, hanya saja masyarakat tidak memiliki semangat untuk menganut budaya politik partisipan. Secara umum masyarakat patuh dan loyal terhadap kebijakan pemerintah serta kebijakan pemimpinnya seperti mengikuti berita-berita terkini mengenai situasi politik yang ada, akan tetapi mereka tetap acuh tak acuh dalam menanggapi kondisi yang terjadi. Sebagaimana dikemukakan oleh RA bahwa:

“Ada juga beberapa masyarakat dari kalangan remaja yang kadang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan bupati. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat realitasnya di masyarakat para remaja ini aktif jhi mengikuti berita-berita tentang politik. Tidak ikut memilih mungkin karena ada suatu program dari calon yang tidak sesuai dengan jalan pemikiran pemuda tersebut. Tapi ini hanya sebagian bisa dibilang dua sampai lima orang.” (RA, 2021).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh SN bahwa:

“Kalau berdasarkan data terbaru itu, sekarang itu masyarakat di Desa Bontobiraeng selatan ada sekita 3000 orang lebih. Dan lebih banyak perempuan dibanding laki-lakinya. Dan kalau dilihat pilkada kemarin itu sebenarnya masih ada beberapa masyarakat yang tidak ikut memilih dan kebanyakan itu dikalangan anak muda.” (SN, 2021).

Selain itu, meskipun banyak kemudian masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tahun 2020 ternyata ada juga beberapa masyarakat khususnya di kalangan remaja yang kadang tidak ikut andil dalam menggunakan atau menunjukkan aspirasinya terhadap pemilihan umum khususnya Pilkada di tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara program kerja yang diajukan oleh calon dengan pola pemikiran remaja itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Bontobiraeng Selatan menilai bahwa visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati tidak mempengaruhi keputusan politik mereka dalam Pilkada Gowa tahun 2020 kemarin. Utamanya di kalangan remaja, mereka menilai apa yang disampaikan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati terkadang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan di awal.

Budaya Politik Mobilisasi

Organisasi masyarakat di tingkat desa seperti Karang Taruna, Remaja Masjid tentu memiliki peran dan pengaruh dalam memobilisasi massa dalam sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Karang Taruna sebagai organisasi masyarakat tingkat desa memiliki basis massa dari kalangan pemuda-pemuda desa dan orang tua yang dapat berperan besar dalam demokrasi suatu daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh RT bahwa:

“Anak-anak di sini yang tergabung dalam organisasi karang taruna dan remaja mesji aktif sekali waktu pemilihan bupati tahun 2020. Mereka memobilisasi masyarakat dengan senam sehat. Acara senam sehat biasanya berakhir dengan pembagian hadiah berupa sembako, dan voucher listrik.” (RT, 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh SS bahwa :

“Organisasi masyarakat di desa ini seperti karang taruna, remaja masjid sangat mendorong masyarakat di sini untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati gowa bukan memilih kotak kosong.” (SS, 2021)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mobilisasi massa bukan hanya dilakukan oleh elit-elit yang profesional. Tetapi di tingkat desa mobilisasi itu bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda desa. Hal itu tidak terlepas dari peran elit, partisipasi akan muncul ketika ada instruksi atau dorongan dari elit.

Hasil observasi di lapangan juga ditemukan berbagai macam masalah yang di mana sebagian besar masyarakat Desa Bontobiraeng Selatan ikut andil dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati dikarenakan mereka mendapat suatu imbalan baik itu berupa komisi ataupun berupa barang. Sehingga, partisipasi masyarakat Desa Bontobiraeng Selatan sepenuhnya belum didasari karena adanya kemauan dan kesadaran murni dalam dirinya untuk berpartisipasi secara aktif, melainkan mereka hanya bersifat pasif dan cenderung pragmatis sebab mereka menggunakan hak

pilihnya karena dimobilisasi oleh tim sukses dari calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gowa.

Faktor yang Mempengaruhi Budaya Politik Masyarakat Bontobiraeng Selatan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada langsung Kabupaten Gowa Tahun 2020 memang banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Bontobiraeng Selatan memilih calon untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa Faktor yang ikut mempengaruhi budaya politik masyarakat Bontobiraeng diantaranya pendidikan, ekonomi dan politik uang.

Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan, karena memberikan pola pikir tentang politik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Ketika pendidikan menjadi lebih maju, itu akan berpengaruh budaya politik suatu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat RT bahwa:

“Dengan pendidikan yang dimiliki oleh generasi muda, atau dalam artian semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan semakin terbuka pula wawasan berpikrnya mengenai sistem politik yang terjadi di daerah kita. Kita bisa lihat di sini anak-anak yang pendidikannya bagus mereka semua ikut berpartisipasi dalam pemilihan bupati. Selain itu juga mereka banyak dilibatkan dalam Pilkada, seperti petugas TPS,

Saksi, dan panitia pemungutan suara.” (RT, 2021)

Orang dengan pendidikan lebih tinggi lebih mampu menyerap informasi baru dengan cepat, yang membantu mereka belajar banyak hal terutama yang berkaitan dengan sistem politik yang ada. Tetapi orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan sering kesulitan beradaptasi dengan keyakinan dan nilai baru.

Tingkat Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi dalam suatu masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap budaya politik masyarakat tersebut. Jika satu orang memiliki banyak uang, mereka mampu menyekolahkan anak mereka lebih tinggi. Artinya tingkat pendidikan masyarakat akan cenderung lebih tinggi. Jika ada banyak orang dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi, itu bisa memberi seseorang banyak kekuatan di masyarakat. Hal ini dapat membuat mereka dihormati dan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Politik Uang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam, ternyata sebagian besar masyarakat Desa Bontobiraeng Selatan yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati juga dikarenakan mereka mendapatkan imbalan atau hibah berupa uang. Sebagaimana dikatakan oleh SS bahwa:

“Tetapi sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan apa yang menjadi tujuan dari calon tersebut. Kadangkala saya juga mendapat serangan berupa barang atau

uang dari pihak yang mencalonkan, jadi saya merasa tidak enak kalau tidak memilihnya.” (SS, 2021).

Realitasnya di masyarakat bahwa praktik politik uang belum sepenuhnya bisa dihilangkan dari sistem politik Indonesia karena pola pikir masyarakat dan kemiskinan yang masih tinggi. Kenyataannya bahwa ada kesaling terkaitan antara politik uang dengan kemiskinan dan tidak bisa dihindari. Jadi selama kemiskinan belum berhasil diatasi maka politik uang akan terus berlanjut.

Hubungan Kekerabatan

Salah satu faktor yang lebih berpengaruh adalah karena hubungan kekerabatan serta darimana calon itu berasal. Seperti halnya di Kabupaten Gowa khususnya Kecamatan Bontonompo yang di mana masyarakatnya lebih banyak berpihak kepada calon Nomor Urut 2 yaitu Adnan-Kio karena dia merupakan keturunan keluarga di Kecamatan Bontonompo.

KESIMPULAN

Secara garis besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bontobiraeng Selatan menunjukkan bahwa praktik budaya politik dalam Pilkada di Bontobiraeng Selatan yaitu menerapkan budaya politik partisipan, budaya politik kaula dan budaya politik mobilisasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat Bontobiraeng Selatan adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor politik uang dan kekerabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasmirah. (2007). *Budaya Politik Etnis Tionghoa*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Pureklolon, T. T. (2021). Eksistensi Budaya Politik di Indonesia: Suatu Kajian. *Jurnal Communitarian*, Vol.3, No. 1, 405-430.
- Rahardjo. (2010). *Pengantar Sosiologi Pertanian dan Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Pers.
- Riyanti, G. (2017). *Budaya Politik Masyarakat Pedesaan (Studi Kualitatif di Desa Rejodadi Kec. Cimanggu Kab. Cilacap)*, Skripsi. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Sitepu, P. A. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2006). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta.
- Tadanugi, I. N. (2015). Budaya Politik Lokal Pada Pilkades di Kecamatan Lage Kabupaten Posos Tahun 2010. *Jurnal Administratie*, Vol. 1, No. 04, 36-40.
- Tini, D. L. (2017). Relasi Budaya Politik Di Madura Terhadap Demokrasi Lokal: Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa. *Public Corner*, Vol. 12, No. 2, 9-25.

Wawancara

- RA. (2021, April 24). Pelajar.
- RT. (2021, April 21). Ketua RT 001 Dusun Kale Anassappu.
- SN. (2021, April 23). Aparat Desa dan Anggota KPPS Desa Bontobiraeng Selatan.
- SS. (2021, April 24). Ibu Rumah Tangga.